

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul Hakim Barakatullah, 2020, *Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis sistem elektronik di Indonesia*, Bandung: Nusa Media.

Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Cetakan ke-2, Jakarta:Kencana.

Adami Chazawi, 2016, *Pelajaran Hukum Pidana: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan, Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Jakarta: RajaGrafindo Persada,

————— 2019, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. Ke-9.

Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya)*, Jakarta: Kencana.

Andi Muhammad Sofyan, et al, 2020, *Hukum Acara Pidana Edisi Ketiga*, Jakarta: Kencana.

Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena.

Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet ke-2, Jakarta: Kencana.

Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Eddy O.S. Hiariej, 2024, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Penyesuaian KUHP Nasional)*, Depok: Rajawali Pers.

Edmon Makarim, 2010, *Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Fauziah Lubis, 2020, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Medan: CV. Mannhaji.

Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pres.

Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.

Ismu Gunadi dan Joenadi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.

- Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Kepel Press.
- Kansil et.al, 2010, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Lilik Mulyadi, 2010, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Bandung: Mandar Maju.
- Mahrus Ali, 2015, *Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Maulidya, Ghoniyah Zulindah et al, 2023, *Ratio Decidendi Putusan, Jenis- Jenis Putusan dan Upaya Hukum Terhadap Putusan yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau dari Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia*. HUKMY: Jurnal Hukum.
- Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumnus.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana,
- Retno I.S Tranggono, Fatma Latifah, 2014, *Buku Pegangan Dasar Kosmetologi*, Jakarta: Sagung Seto.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Shidarta, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo.
- Soejono dan H. Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2014, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermanfaat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, Jakarta: Sangir Multi Usaha.
- Widodo, W., & Utami, W, (2014), *Hukum Pidana dan Penologi*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Eresco.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam.

Skripsi, Tesis dan Disertasi:

Armina Arofah, 2025, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Atas Peredaran Kosmetik Palsu Menurut Undang-Undang Kesehatan*, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung.

Risma Wahyuni, 2025, *Analisis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Peracikan dan Pemasaran Kosmetik Ilegal Secara Online (Studi Putusan Nomor: 37/Pid.Sus/2023/PN LSK)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Jurnal/ Artikel Ilmiah :

Asirah, dkk, 2023, Upaya Penegakan Hukum Peredaran Kosmetik Ilegal Melalui Sistem elektronik Oleh PPNS BBPOM Makassar, UNES LAW REVIEW, Vol 5 No. 3.

Erlinda Putri Nurdiyanti, dkk, 2024, Pelindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Kosmetik Online Ilegal Melalui Sistem elektronik, Jurnal Hukum dan Ham Wara Sains, Vol. 3 No. 3.

Helda Okta Havifah, 2024, Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Keadaan Meringankan Hukuman Pada Putusan MA Nomor 813k/Pid/2023 Berdasarkan Asas Proporsionalitas Pemidanaan, Jurnal Hukum dan Sosial Politik Volume 2 Nomor 3.

Rania Femi Salsabila, AMA Suyanto, 2022, Analisis Faktor-Faktor Pembelian Impulsif pada sistem elektronik Kecantikan, Jurnal Samudra Ekonomi & Bisnis Vol. 13, No. 1.

S.S. Rivanie, dkk, 2022, Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan, Halu Oleo Law Review, Vol. 6, No. 2, Universitas Halu Oleo, Kendari.